

**PELAKSANAAN GADAI EMAS KETIKA NASABAH
WANPRESTASI PADA BANK SYARIAH**

TESIS



Disusun Oleh :

**AYU KUSUMA
NIM : 12111009**

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS NAROTAMA

2012

DAFTAR ISI

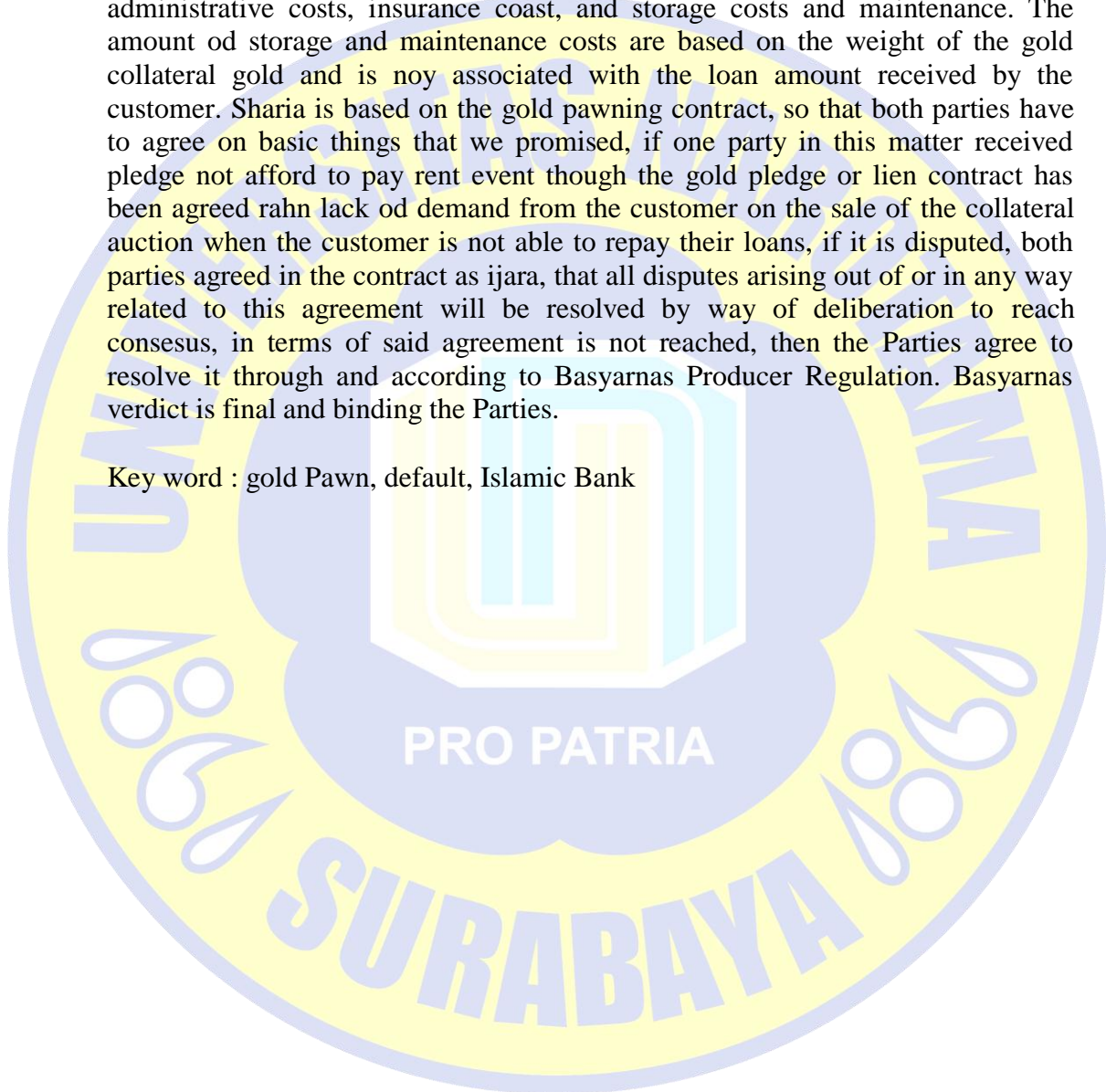
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRACT	viii
RINGKASAN	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang Masalah.....	1
2. Rumusan Masalah.....	7
3. Tujuan Penulisan.....	7
4. Manfaat Penelitian.....	8
5. Kajian Pustaka	8
6. Metode Penelitian	15
7. Sistematika Penulisan	16
BAB II KARAKTERISTIK PERJANJIAN GADAI DALAM SYARIAH	18
1. Dasar Hukum Akad Gadai Emas Syariah	18
2. Karakteristik Dalam <i>Rahn</i> Emas.....	23
BAB III PERJANJIAN GADAI SYARIAH JIKA PENERIMA GADAI	
 WANPRESTASI.....	40
1. Prosedur Gadai Syariah Dalam Bank Syariah	40
2. Wanprestasi Dalam Gadai	52
3. Penyelesaian Jika Terjadi Permasalahan Dalam Gadai Syariah	54
BAB IV PENUTUP	58
1. Kesimpulan.....	58
2. Saran	59
DAFTAR BACAAN	

ABSTRACT

This thesis entitled problem of gold pawn sharia when recipients breach of contract. Issues to be discussed in this thesis is how the characteristics of the gold agreement in the Islamic juridical implications of the agreement and whether the lien against the giver of gold Sharia mortgage (the debtor) if the recipient liens (creditors) have defaulted.

The results obtained in this thesis is that the mortgage contract is intended only gold Sharia group Micro and Small Enterprise customers, the contract is an agreement rahn used for binding the gold as collateral for loans, and ijara contract, for the binding of storage utilization and maintenance services of gold as collateral for loans. Costs can be imposed by the Islamic Bank or UUS to customers such as administrative costs, insurance cost, and storage costs and maintenance. The amount of storage and maintenance costs are based on the weight of the gold collateral gold and is not associated with the loan amount received by the customer. Sharia is based on the gold pawning contract, so that both parties have to agree on basic things that we promised, if one party in this matter received pledge not afford to pay rent even though the gold pledge or lien contract has been agreed rahn lack of demand from the customer on the sale of the collateral auction when the customer is not able to repay their loans, if it is disputed, both parties agreed in the contract as ijara, that all disputes arising out of or in any way related to this agreement will be resolved by way of deliberation to reach consensus, in terms of said agreement is not reached, then the Parties agree to resolve it through and according to Basyarnas Producer Regulation. Basyarnas verdict is final and binding the Parties.

Key word : gold Pawn, default, Islamic Bank



RINGKASAN

Judul tesis ini adalah Problematika Gadai Emas Syariah Ketika Penerima Gadai Wanprestasi yaitu Karakteristik perjanjian gadai dalam syariah, bahwa akad gadai emas syariah hanya diperuntukan golongan nasabah Usaha Mikro dan Kecil, akad yang digunakan adalah akad rahn, untuk pengikatan emas sebagai agunan atas pinjaman dana; dan akad ijarah, untuk pengikatan pemanfaatan jasa penyimpanan dan pemeliharaan emas sebagai agunan pinjaman dana. Biaya yang dapat dikenakan oleh Bank Syariah atau UUS kepada nasabah antara lain biaya administrasi, biaya asuransi, dan biaya penyimpanan dan pemeliharaan. Penetapan besarnya biaya penyimpanan dan pemeliharaan agunan emas didasarkan pada beat agunan emas dan tidak dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang diterima nasabah. Sumber dana dapat berasal dari bagian modal, keuntungan yang disisihkan, dan/atau dana pihak ketiga, pendapat dari penyimpanan dan pemeliharaan emas yang berasal dari produk Qardh Beragun Emas yang sumber pemeliharaan emas yang berasal dari dana pihak ketiga harus dibagikan kepada nasabah penyimpan dana, pemberian Qardh Beragun Emas wajib didukung kebijakan dan prosedur (Standard Operating Procedure/SOP) tertulis secara memadai, termasuk penerapan manajemen risiko. Bank syariah atau UUS wajib menjelaskan secara lisan atau tertulis (transparan) kepada nasabah antara lain karakteristik produk antara lain fitur, risiko, manfaat, biaya, persyaratan dan penyelesaian apabila terdapat sengketa, hak dan kewajiban nasabah termasuk apabila terjadi eksekusi agunan emas.

Gadai emas Syariah didasarkan atas akad, sehingga kedua belah pihak telah mencapai kata sepakat mengenai hal-hal pokok yang dijanjikan, apabila salah satu pihak dalam hal ini menerima gadai tidak mampu membayar uang sewa gadai emas meskipun dalam akad rahn atau gadai telah disepakati tidak adanya tuntutan dari nasabah atas penjualan lelang barang agunan ketika nasabah tidak mampu mengembalikan pinjamannya, jika ternyata dipermasalahkan, kedua belah pihak sepakat sebagaimana dalam akad ijarah, bahwa segala sengketa yang timbul dari atau dengan cara apapun yang ada hubungannya dengan Akad ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah mencapai mufakat, dalam hal tidak tercapai kata mufakat, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui dan menurut Peraturan Produser Basyarnas. Putusan Basyarnas bersifat final dan mengikat Para Pihak.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Karakteristik perjanjian gadai dalam Syariah, bahwa akad gadai emas Syariah hanya diperuntukan golongan nasabah Usaha Mikro dan Kecil, akad yang digunakan adalah akad *rahn*, untuk pengikatan emas sebagai agunan atas pinjaman dana; dan akad *ijarah*, untuk pengikatan pemanfaatan jasa penyimpanan dan pemeliharaan emas sebagai agunan pinjaman dana. Biaya yang dapat dikenakan oleh Bank Syariah atau UUS kepada nasabah antara lain biaya administrasi, biaya asuransi, dan biaya penyimpanan dan pemeliharaan. Penetapan besarnya biaya penyimpanan dan pemeliharaan agunan emas didasarkan pada berat agunan emas dan tidak dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang diterima nasabah. Sumber dana dapat berasal dari bagian modal, keuntungan yang disisihkan, dan/atau dana pihak ketiga. Pendapatan dari penyimpanan dan pemeliharaan emas yang berasal dari produk Qardh Beragun Emas yang sumber dananya berasal dari dana pihak ketiga harus dibagikan kepada nasabah penyimpan dana, pemberian Qardh Beragun Emas wajib didukung kebijakan dan prosedur (Standard Operating Procedure/SOP) tertulis secara memadai, termasuk penerapan manajemen risiko. Bank Syariah atau UUS wajib menjelaskan secara lisan atau tertulis (transparan) kepada nasabah antara lain karakteristik produk antara lain fitur, risiko, manfaat, biaya, persyaratan, dan penyelesaian apabila terdapat sengketa; hak dan kewajiban nasabah termasuk apabila terjadi eksekusi agunan emas.
- b. Gadai emas Syariah didasarkan atas akad, sehingga kedua belah pihak telah mencapai kata sepakat mengenai hal-hal pokok yang dijanjikan,

apabila salah satu pihak dalam hal ini menerima gadai tidak mampu membayar uang sewa gadai emas meskipun dalam akad *rahn* atau gadai telah disepakati tidak adanya tuntutan dari nasabah atas penjualan lelang barang agunan ketika nasabah tidak mampu mengembalikan pinjamannya, jika ternyata dipermasalahkan, kedua belah pihak sepakat sebagaimana dalam akad ijarah, bahwa segala sengketa yang timbul dari atau dengan cara apapun yang ada hubungannya dengan Akad ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat, dalam hal tidak tercapai kata mufakat, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui dan menurut Peraturan Produser Basyarnas. Putusan Basyarnas bersifat final dan mengikat Para Pihak.

2. Saran

- a. Hendaknya mengenai karakteristik akad gadai emas Syariah tersebut benar-benar diperharikan dan sekaligus juga bank Syariah menerapkan Prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan gadai emas Syariah terutama mengenai tujuan penggunaan dana oleh nasabah wajib dicantumkan secara jelas pada formulir aplikasi produk dan emas yang akan diserahkan sebagai agunan Qardh Beragun emas harus sudah dimiliki oleh nasabah pada saat permohonan pembiayaan diajukan, agar menjaga kemurnian gadai emas Syariah dengan Prinsip sariat Islam.
- b. Gadai Syariah merupakan pengembangan gadai secara konvensional didasarkan atas perjanjian pinjam meminjam dengan penyerahan barang sebagai jaminan utang, padahal dalam gadai emas Syariah tidak ada perjanjian pinjam meminjam melainkan penitipan emas dengan membayar uang sewa, untuk itu dalam penyelesaian sengketa apabila pemberi gadai emas wanprestasi, menghindari tuntutan hukum ke pengadilan.

DAFTAR BACAAN

Buku

Abdul Kadir Muhammad, *Segi-segi Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1993

Abdurrahmasn Al-Jaziri, *Fiqh `ala Al-Madzahib Al-Arba 'ah*, Jilid 2, Beirut: Dari Al-Fikr

Afdol, *Legislasi Hukum Islam Di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 2009

Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori dan Praktek*, (selanjutnya disingkat Muhammad Syaff i Antonio 1), Gema Insani, Jakarta, 2001

Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : Wacana Ulama dan Cendekiawan*, Bank Indonesia dan Tazkia Intitute, Jakarta

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006

Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000

Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institut Bankir Indonesia, 2001

Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait BMI & Takaful Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002

Yahya Harahap, M., *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986
Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

Peraturan Perundang-undangan

Burgerlijk Wetboek (B.W.)

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3632);

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (LN RI Tahun 1992 Tahun 1992 Nomor 53, TLN RI Nomor 3481)

UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (LN RI Tahun 1999 Nomor 168, TLN RI Nomor 3889)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4867

Majalah, Internet

Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, h. 83-84, Sebagaimana Dikutip Dari Muhammad Amin Suma, Ekonomi Syariah Sebagai Alternatif Sistem Ekonomi Konvensional, Jurnal Hukum Bisnis, XX, 2002

Trisadini P. Usanti, "Tinjauan Yuridis Pembiayaan Ijarah Oleh Bally S)q Amita, Vol 1, No. 2 September 1999

www.yahoo.com Bambang Pramono, Gadai Syariah: Jasa Sewa Simp arang, Dikutip Senin, 7 Februari 2011.

www.Tribunnews.com — diakses Senin, 7 Februari 2011 09:03 WIB

genthongx.blogspot.com. Diakses tanggal 20 Marer 2011

www.Tribunnews.com — diakses Senin, 7 Februari 2011 09:03 WIB

www.kaskus.us/showthread., diakses Senin, 7 Februari 2011 09:03 WIB

